

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Badan Pertanahan Nasional, 1989, *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, Jakarta.
- Bactiar, Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Chandra, S., 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. VI.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, dkk., 1988, *Bahan Ajar: Hukum Dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta.
- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Nurlinda, Ida, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Parlindungan, A.P., 1994, *Serba-Serbi Hukum Agraria, Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961*, Penerbit Alumni, Bandung.
- _____, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP 24 tahun 1997)*, Mandar Maju, Bandung.
- Prakoso, Djoko dan Budiman Adi Purwanto, 1985, *Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Pranjoto, H. Eddy 2006, *Anatomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional*, CV. Utomo, Bandung.

Prajoto, Edi 2006, *Anitomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional*, CV. Utomo, Bandung.

Prints, Darwan, 1996, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Aditya Bakti, Bandung,

Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.

Saleh, K. Wantijk, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soematrono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indoensia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soerodjo, Irawan, 2002, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Aekola Surabaya, Surabaya.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

C. Tesis

Andi Mardani, 2008, Pelaksanaan Pencatatan Dalam Buku tanah Menurut Ketentuan Pasal 126 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

D. Skripsi

Desi Martika Vitasari, 2013, Pelaksanaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.